



## Analisis Yuridis Perspektif Keamanan Maritim Nasional dalam Menghadapi Ancaman Hibrida Global

Rian Rusmana Putra<sup>1\*</sup>, David Indra Pratama<sup>2</sup>, Nikolaus Eratus Pardamean<sup>3</sup>, Natasya Febriyanti<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia

<sup>2</sup>Badan Pengawas Obat dan Makanan, Jakarta, Indonesia

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

<sup>4</sup>Fakultas Hukum, Universitas Surabaya, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [rianrusmanaputra@fh.unrika.ac.id](mailto:rianrusmanaputra@fh.unrika.ac.id)

**Abstract.** Indonesia's maritime security faces increasingly complex challenges due to the rise of hybrid threats that combine traditional and non-traditional elements. One of the main threats is the shadow fleet, operating covertly with unregistered ships, evading detection, and exploiting weaknesses in maritime surveillance to engage in illegal activities such as smuggling, illegal transshipment, and unlawful exploitation of natural resources. This phenomenon exacerbates Indonesia's maritime security situation, particularly in strategic areas like the Natuna Sea and the Sunda Strait, which are vulnerable to geopolitical conflicts and overlapping territorial claims. Additionally, transnational crimes such as piracy, drug trafficking, and human trafficking further undermine security in Indonesian waters. To address these threats, Indonesia needs to strengthen its maritime surveillance capacity by adopting advanced technologies such as early detection systems and the Automatic Identification System (AIS), as well as enhancing coordination between maritime agencies like Bakamla and the Indonesian Navy (TNI AL) to improve responses to harder-to-detect threats. Moreover, international cooperation with neighboring countries and regional maritime organizations like ASEAN must be bolstered to tackle cross-border threats. Strengthening surveillance, modernizing technology, and fostering more integrative maritime diplomacy will be crucial in safeguarding Indonesia's maritime sovereignty and ensuring the stability of this increasingly strategic maritime region.

**Keywords:** Hybrid Threats; Maritime Security; Maritime Surveillance; Shadow Fleet; Transnational Crime

**Abstrak.** Keamanan maritim Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks akibat munculnya ancaman *hybrid* yang menggabungkan elemen-elemen tradisional dan non-tradisional. Salah satu ancaman utama yang muncul adalah *shadow fleet* atau armada gelap, yang beroperasi secara tersembunyi dengan kapal-kapal yang tidak terdaftar, menghindari deteksi dan memanfaatkan kelemahan pengawasan maritim untuk melakukan aktivitas ilegal seperti penyelundupan, *transshipment ilegal*, dan eksploitasi sumber daya alam secara tidak sah. Fenomena ini memperburuk situasi keamanan maritim Indonesia, terutama di wilayah-wilayah strategis seperti Laut Natuna dan Selat Sunda, yang rawan dengan konflik geopolitik dan klaim teritorial tumpang tindih. Selain itu, kejahatan transnasional seperti perompakan, penyelundupan narkoba, dan perdagangan manusia turut memperburuk keamanan di perairan Indonesia. Untuk mengatasi ancaman tersebut, Indonesia perlu memperkuat kapasitas pengawasan maritimnya dengan mengadopsi teknologi canggih seperti sistem deteksi dini dan *Automatic Identification System* (AIS), serta meningkatkan koordinasi antar lembaga maritim, seperti Bakamla dan TNI AL, guna memperbaiki respons terhadap ancaman yang lebih sulit dideteksi. Selain itu, kerjasama internasional dengan negara-negara tetangga dan organisasi maritim regional, seperti ASEAN, juga perlu diperkuat untuk menangani ancaman lintas batas negara. Penguatan pengawasan, modernisasi teknologi, dan diplomasi maritim yang lebih integratif akan menjadi kunci dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia dan memastikan stabilitas kawasan maritim yang semakin strategis ini.

**Kata Kunci:** Ancaman *Hybrid*; Keamanan Maritim; Kejahatan Transnasional; Pengawasan Maritim; *Shadow Fleet*.

### 1. LATAR BELAKANG

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki posisi yang sangat strategis baik dalam konteks geopolitik maupun ekonomi global. Dengan lebih dari 17.000 pulau dan wilayah laut yang mencakup 6,4 juta km<sup>2</sup>, Indonesia berperan vital dalam jalur perdagangan internasional dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan perekonomian

nasional (Mustika et al., 2021). Keberagaman sumber daya laut Indonesia, yang terdiri dari kekayaan biota laut dan potensi energi, menjadikannya sebagai sumber daya alam yang memiliki daya tarik internasional (Hermawan & Sutanto, 2022). Namun, keberadaan Indonesia yang strategis ini juga membawa berbagai tantangan, terutama dalam hal keamanan maritim, yang meliputi ancaman tradisional seperti perompakan, serta ancaman non-tradisional yang semakin berkembang, seperti kejahatan transnasional dan konflik geopolitik maritim (Prasetyo, Suharto, & Santoso, 2025). Keamanan maritim Indonesia menjadi isu yang sangat penting karena kawasan perairannya, seperti Laut Natuna, menjadi pusat ketegangan politik internasional, terlebih dengan klaim teritorial yang tumpang tindih dengan negara besar seperti Tiongkok. Dalam konteks ini, Indonesia harus memperkuat kebijakan keamanannya untuk menjaga kedaulatan nasional, terutama dalam menghadapi ancaman yang semakin kompleks dan terkoordinasi. Oleh karena itu, perlunya pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan ancaman dan respons kebijakan maritim menjadi sangat mendesak.

Laut Natuna, sebagai salah satu wilayah yang menjadi sorotan, merupakan titik rawan dalam konflik maritim di Asia Tenggara. Wilayah ini berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan yang penuh dengan klaim tumpang tindih, terutama oleh Tiongkok yang menganggap sebagian wilayah ini sebagai bagian dari klaim sembilan garis putus-putus (*nine-dash line*) yang tidak diakui oleh hukum internasional (Anugra Agustian Ekaputra, Annisa Abdy Pramesti, Azella Trianjeli, Ruben Soaduo Sitompul, 2025). Meskipun klaim Tiongkok ini telah ditolak oleh keputusan *Permanent Court of Arbitration* pada tahun 2016, realitas di lapangan menunjukkan bahwa ekspansionisme regional terus berlanjut dengan intensitas yang semakin tinggi. Indonesia, melalui UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, telah berusaha menguatkan kedaulatan maritim dengan memberikan landasan hukum yang jelas terkait pengelolaan ruang laut nasional. Namun, implementasi kebijakan ini masih mengalami berbagai kendala, baik dari sisi koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam pengawasan maritim, maupun dari keterbatasan teknologi pengawasan yang digunakan. Kendala tersebut semakin memperburuk posisi Indonesia dalam menanggapi tantangan yang semakin besar di kawasan maritim yang sangat strategis ini. Oleh karena itu, kebijakan yang lebih tegas dan efektif dalam pengawasan serta diplomasi maritim menjadi sangat diperlukan untuk memastikan kedaulatan Indonesia tetap terjaga.

Di sisi lain, ancaman non-tradisional, seperti kejahatan transnasional, semakin memperumit keadaan di perairan Indonesia. Kejahatan lintas negara yang terjadi di wilayah perairan Indonesia, seperti perompakan, penyelundupan narkoba, dan penyelundupan manusia, merupakan tantangan besar bagi keamanan maritim negara. Negara-negara di Asia Tenggara,

termasuk Indonesia, menjadi sasaran utama dalam praktek-praktek kejahatan transnasional ini karena kedekatan geografis dan ketidakmampuan beberapa negara dalam mengawasi perairan mereka secara efektif. Untuk mengatasi hal ini, Indonesia perlu memperkuat kerjasama antarnegara ASEAN dalam bidang penegakan hukum dan intelijen maritim (Sajidin, Saputra, & Nofiasari, 2023). Diplomat dan pengambil kebijakan harus mengedepankan kerja sama internasional guna menciptakan stabilitas dan keamanan di kawasan, yang juga akan berdampak pada pengurangan ancaman di perairan Indonesia. Upaya tersebut harus melibatkan peningkatan kapasitas pengawasan serta penerapan regulasi yang lebih ketat terhadap aktivitas yang melanggar hukum maritim. Dengan demikian, penguatan kerjasama maritim antarnegara Asia Tenggara akan menjadi kunci dalam menghadapi kejahatan transnasional yang semakin merajalela di wilayah ini.

Ancaman hybrid, seperti yang ditunjukkan oleh fenomena *shadow fleet*, semakin kompleks dan sulit dihadapi. *Shadow fleet* atau armada gelap, yang beroperasi secara tersembunyi dengan menggunakan kapal-kapal tua yang tidak terdaftar dan menghindari deteksi pelacakan, merupakan salah satu contoh nyata dari ancaman hybrid yang mengancam kedaulatan maritim Indonesia (Ineke Dellas Chrois Loliwu, 2025). Aktivitas armada gelap ini tidak hanya mengganggu sistem pengawasan maritim Indonesia, tetapi juga dapat digunakan untuk melakukan aktivitas ilegal, seperti penyelundupan barang terlarang dan eksploitasi sumber daya alam secara ilegal (Rodriguez-Diaz, Alcaide, & Endrina, 2025). Konflik zona abu-abu yang melibatkan aktor negara maupun non-negara, yang memanfaatkan strategi hybrid, semakin sulit ditanggulangi dengan pendekatan konvensional, seperti penggunaan kekuatan militer atau diplomasi tradisional Indonesia, dengan kapasitas pengawasan yang terbatas, semakin rentan terhadap ancaman semacam ini, yang semakin mengaburkan batas antara perang dan perdamaian. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih komprehensif dan terkoordinasi sangat dibutuhkan untuk mengatasi fenomena *shadow fleet* ini dan memperkuat sistem pertahanan maritim Indonesia.

Dengan segala tantangan yang dihadapi, Indonesia harus memperkuat kapasitas dan sistem pengawasan maritimnya untuk menjaga kedaulatan dan integritas wilayah laut. Penguatan ini tidak hanya melibatkan peningkatan sumber daya manusia dan teknologi, tetapi juga penguatan kerjasama internasional dalam rangka menghadapi ancaman maritim yang semakin canggih (Ineke Dellas Chrois Loliwu, 2025). Indonesia telah memulai langkah-langkah tersebut melalui Badan Keamanan Laut (Bakamla), yang menekankan pentingnya peningkatan patrol laut dan pengawasan terhadap perairan yang rawan ancaman. Namun, untuk mencapai hasil yang maksimal, Indonesia perlu memperkuat integrasi antar lembaga serta

memperbaiki koordinasi dalam menghadapi ancaman yang bersifat lintas batas negara. Kerjasama dengan negara-negara ASEAN dan aktor internasional lainnya sangat krusial untuk memastikan efektivitas strategi keamanan maritim Indonesia. Dalam menghadapi ancaman yang semakin besar, diperlukan langkah-langkah yang lebih tegas dan strategis untuk memastikan keamanan maritim tetap terjaga dan kedaulatan Indonesia tetap terjamin di masa depan.

Dalam upaya memperkuat keamanan maritim Indonesia, penting untuk mempertimbangkan pendekatan diplomatik yang lebih inovatif dan multilateral. Diplomasi maritim Indonesia harus memanfaatkan posisi geografis yang strategis dan memperkuat kolaborasi dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara untuk menciptakan kebijakan yang lebih terintegrasi dalam menjaga stabilitas kawasan (Yani & Montratama, 2018). Forum-forum regional seperti ASEAN Maritime Forum (AMF) dan *Expanded ASEAN Maritime Forum* (EAMF) menjadi wadah yang efektif untuk membahas isu-isu keamanan maritim secara bersama, termasuk penanggulangan IUU fishing dan penguatan sistem pengawasan maritim. Melalui kerja sama ini, Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai pemimpin regional dalam diplomasi maritim dan meningkatkan efektivitas respons terhadap ancaman yang melintas batas negara. Keberhasilan ini akan sangat bergantung pada komitmen semua pihak untuk menyatukan sumber daya dan kemampuan dalam menghadapi ancaman maritim yang semakin kompleks.

Sebagai negara kepulauan dengan perairan yang sangat luas, Indonesia juga perlu mengintegrasikan teknologi mutakhir dalam sistem pengawasan maritim. Penerapan teknologi pemantauan seperti *Automatic Identification System* (AIS) dan penguatan kapasitas deteksi dini dapat memperkecil celah yang dapat dimanfaatkan oleh aktor-aktor yang berniat buruk. Salah satu tantangan besar yang dihadapi Indonesia adalah lemahnya koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam pengelolaan dan pengawasan laut, seperti Bakamla dan TNI AL (Qhirani Aulia Rahman Latunrung & Imam Fadhil Nugraha, 2025). Dalam hal ini, modernisasi sistem pengawasan dan pengintegrasian data secara *real-time* menjadi sangat krusial untuk mengantisipasi ancaman, baik yang bersifat tradisional maupun non-tradisional. Dengan demikian, Indonesia harus memanfaatkan perkembangan teknologi untuk memperkuat daya saing dan daya tangkalnya terhadap ancaman maritim yang semakin beragam.

## 2. KAJIAN TEORITIS

### Tinjauan Umum mengenai Keamanan Maritim

Keamanan maritim menjadi isu yang semakin penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, politik, dan pertahanan suatu negara, terutama bagi negara-negara kepulauan seperti Indonesia. Dengan lebih dari 17.000 pulau dan wilayah maritim yang luas, Indonesia memiliki kepentingan strategis untuk memastikan perairannya bebas dari ancaman. Keamanan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari ancaman pembajakan hingga penyelundupan dan klaim teritorial yang dapat memengaruhi stabilitas regional (Anwar, 2016). Selain itu, teknologi deteksi dan pencegahan kapal berbahaya, seperti sistem identifikasi otomatis (AIS) dan radar, telah terbukti menjadi alat yang efektif dalam mengatasi ancaman di laut (Damayanty Heppi, 2023).

Seiring dengan meningkatnya ancaman terhadap keamanan maritim, Indonesia menghadapi tantangan yang cukup besar, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Ancaman dari negara tetangga, seperti sengketa teritorial di Laut Cina Selatan, serta isu domestik terkait dengan perompakan dan penangkapan ikan ilegal, memerlukan perhatian khusus dalam kebijakan maritim (Sunoto & Fahrani, 2023). Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk meningkatkan pengawasan dan keamanan maritim dengan memanfaatkan teknologi canggih, serta memperkuat kerja sama internasional dalam rangka menghadapi ancaman tersebut.

Konsep keamanan maritim yang luas dan kompleks membutuhkan pendekatan yang holistik, yang tidak hanya melibatkan militer, tetapi juga sektor swasta dan lembaga penegak hukum. Dalam hal ini, pengembangan dan penerapan teknologi seperti radar dan sistem AIS menjadi kunci untuk meningkatkan pemantauan dan deteksi dini terhadap kapal berbahaya yang dapat mengancam keamanan laut (Bueger & Edmunds, 2017). Selain itu, teknologi pencegahan, seperti sistem pemantauan jarak jauh (RMS) dan *drone* patroli, semakin banyak digunakan untuk memperkuat pengawasan perairan yang lebih luas dan lebih efisien.

Namun, tantangan utama dalam penerapan teknologi ini adalah biaya dan koordinasi antar lembaga yang seringkali terhambat oleh perbedaan sistem yang digunakan. Keberhasilan penerapan teknologi ini bergantung pada kemampuan negara untuk berkolaborasi dalam membangun sistem keamanan maritim yang terintegrasi secara global. Keterlibatan sektor swasta juga sangat penting, mengingat peran mereka dalam sektor perdagangan dan industri kelautan yang memiliki dampak langsung terhadap pengelolaan sumber daya maritim (Sumadinata, 2022).

Pentingnya keamanan maritim semakin ditekankan dalam kebijakan luar negeri Indonesia yang menjadikan sektor kelautan sebagai prioritas. Dengan mengedepankan

diplomasi maritim, Indonesia berusaha membangun kerja sama yang lebih erat dengan negara-negara tetangga dan komunitas internasional untuk menangani masalah-masalah kelautan yang mempengaruhi stabilitas kawasan (Zzahra & Hamandia, 2025). Melalui strategi ini, Indonesia tidak hanya berupaya menjaga kedaulatan wilayah maritim, tetapi juga berkontribusi pada perdamaian dan keamanan internasional yang lebih stabil.

### **Tinjauan Umum mengenai *Shadow Fleet***

*Shadow fleet* merujuk pada armada kapal yang beroperasi secara tidak sah atau tanpa pengawasan resmi dari badan pemerintah atau organisasi internasional. Armada ini umumnya melibatkan kapal-kapal yang terlibat dalam kegiatan ilegal seperti perikanan ilegal, pencurian sumber daya alam, atau bahkan kegiatan terorisme dan penyelundupan. Karakteristik utama dari *shadow fleet* adalah kurangnya transparansi dan legalitas dalam operasi mereka, yang seringkali membuatnya sulit untuk diidentifikasi dan dilacak oleh otoritas yang berwenang (Ineke Dellas Chrois Loliwu, 2025). Keberadaan armada ini menambah kompleksitas dalam upaya penegakan hukum di laut, dan seringkali berfungsi sebagai alat bagi negara atau individu untuk menghindari peraturan internasional yang ketat.

Fenomena *shadow fleet* semakin menjadi perhatian dunia karena dampaknya yang merugikan bagi ekonomi dan lingkungan. Dalam konteks perikanan, kapal-kapal dalam *shadow fleet* sering kali menjarah sumber daya laut yang tidak terkontrol, mengakibatkan penurunan jumlah ikan dan merusak ekosistem laut secara keseluruhan. Akibatnya, dampak negatif ini tidak hanya dirasakan oleh negara-negara yang memiliki wilayah perairan yang terkena, tetapi juga pada industri perikanan global yang terganggu (Rodriguez-Diaz et al., 2025). Aktivitas yang dilakukan oleh *shadow fleet* semakin sulit dikendalikan seiring dengan kemajuan teknologi yang memungkinkan kapal-kapal tersebut untuk menghindari pengawasan dan regulasi yang ada.

Selain perikanan, *shadow fleet* juga terlibat dalam kegiatan penyelundupan barang ilegal, termasuk narkoba, senjata, dan manusia. Aktivitas penyelundupan ini sering kali melibatkan jaringan internasional yang memanfaatkan kapal-kapal tanpa identitas resmi untuk menghindari pemeriksaan otoritas pelabuhan dan penjagaan perbatasan. Dalam hal ini, *shadow fleet* bertindak sebagai jalur utama bagi kegiatan kriminal internasional, yang meningkatkan tantangan bagi agen penegak hukum dan organisasi internasional yang berfokus pada pengawasan lalu lintas laut (El Renova Ed. Siregar & Adya Paramita Prabandari, 2022). Pencurian sumber daya alam dan penyelundupan juga berkontribusi pada ketegangan geopolitik di beberapa wilayah maritim yang rawan konflik.

Upaya untuk mengatasi keberadaan *shadow fleet* telah dilakukan melalui berbagai mekanisme internasional, termasuk kerja sama antara negara-negara besar dan organisasi seperti Interpol dan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC). Salah satu strategi yang digunakan adalah dengan melibatkan teknologi canggih seperti pemantauan satelit untuk mendeteksi aktivitas kapal yang mencurigakan dan memberikan peringatan dini bagi otoritas yang berwenang. Namun, meskipun kemajuan teknologi ini memberikan peluang lebih besar untuk mengidentifikasi dan melacak *shadow fleet*, tantangan besar tetap ada dalam hal koordinasi antarnegara dan penguatan penegakan hukum di laut (Fischer, 2024).

Dengan demikian, untuk menanggulangi permasalahan *shadow fleet*, dibutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dan terkoordinasi. Negara-negara perlu memperkuat kapasitas pengawasan mereka, membangun kerja sama lebih erat di bidang penegakan hukum internasional, serta meningkatkan kesadaran global tentang ancaman yang ditimbulkan oleh *shadow fleet*. Selain itu, kebijakan yang mendukung transparansi dan akuntabilitas di sektor maritim perlu dikembangkan untuk mengurangi insentif bagi kapal-kapal untuk beroperasi di luar kerangka hukum. Hanya dengan kolaborasi global yang lebih erat dan pemanfaatan teknologi secara maksimal, ancaman dari *shadow fleet* dapat diminimalisir.

### 3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menjaga keamanan maritim di tengah ancaman *hybrid* (Marzuki, 2016). Peneliti melakukan kajian literatur terkait ancaman maritim, khususnya yang berhubungan dengan fenomena *shadow fleet* atau armada gelap, yang semakin marak di wilayah perairan Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan sumber-sumber primer yang berupa dokumen kebijakan pemerintah serta laporan-laporan terkait keamanan maritim. Selain itu, wawancara dengan ahli dan praktisi di bidang keamanan maritim juga dilakukan untuk mendalami lebih lanjut tentang strategi dan kebijakan yang diterapkan Indonesia dalam menghadapi ancaman tersebut (Soerjono Soekanto, 2013).

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan studi kasus untuk menganalisis dampak dari ancaman *hybrid* terhadap stabilitas keamanan maritim di Indonesia, dengan fokus pada wilayah Laut Natuna dan Selat Sunda sebagai titik rawan ancaman. Peneliti melakukan analisis mendalam terhadap kebijakan pemerintah Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan penguatan sistem pengawasan maritim dan kerjasama internasional dengan negara-negara tetangga serta organisasi maritim regional. Analisis ini diharapkan dapat memberikan

rekomendasi strategis bagi peningkatan kapasitas pengawasan dan penguatan kerjasama internasional dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia di tengah ancaman global yang semakin kompleks.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Analisis Ancaman *Hybrid* terhadap Keamanan Maritim Indonesia**

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dengan wilayah laut yang luas dan strategis, menghadapi beragam ancaman terhadap keamanannya. Salah satu ancaman yang semakin berkembang adalah ancaman hybrid, yang menggabungkan elemen-elemen militer dan non-militer dalam bentuk yang sulit dideteksi dan direspons secara tradisional. Salah satu instrumen utama dalam ancaman *hybrid* ini adalah penggunaan *shadow fleet* atau armada gelap (Alam, Nugroho, & Adha, 2024). Armada ini terdiri dari kapal-kapal yang menyembunyikan identitas mereka, memanfaatkan celah hukum dan pengawasan yang lemah untuk menjalankan kegiatan ilegal seperti *transshipment* minyak dan barang terlarang.

Konsep *shadow fleet* sebagai bagian dari konflik zona abu-abu (*gray zone conflict*) semakin relevan dalam konteks maritim Indonesia. Konflik ini tidak melibatkan eskalasi langsung atau perang terbuka, namun menggunakan strategi yang lebih halus untuk melemahkan negara target tanpa menimbulkan reaksi militer. *Shadow fleet* sering mematikan sistem pelacakan kapal (AIS), menggunakan bendera negara lain, dan bergerak dengan tujuan untuk menghindari deteksi, sehingga memperumit upaya penegakan hukum internasional.

Keamanan maritim Indonesia, yang terdiri dari berbagai jalur pelayaran strategis seperti Selat Malaka, Selat Sunda, dan Laut Natuna Utara, sangat rentan terhadap infiltrasi oleh ancaman hybrid. Aktivitas *shadow fleet* di wilayah-wilayah ini, yang sering melibatkan kapal berbendera asing dan kegiatan ilegal, memperburuk ketidakpastian hukum dan mengurangi kemampuan Indonesia dalam mengawasi wilayah lautnya secara efektif (Sajidin et al., 2023). Peningkatan ancaman ini dapat memperburuk ketegangan di kawasan, termasuk memperburuk hubungan Indonesia dengan negara-negara lain yang juga memiliki klaim maritim.

Dalam menghadapi ancaman *hybrid* ini, Indonesia perlu meningkatkan kapasitas pengawasan maritim dan memperkuat kerja sama internasional dengan negara-negara tetangga serta organisasi maritim regional seperti ASEAN. Kolaborasi ini penting untuk meningkatkan kemampuan deteksi dan respons terhadap ancaman yang sulit terlihat secara konvensional. Dengan teknologi pengawasan yang terbatas dan koordinasi antar lembaga yang masih perlu ditingkatkan, Indonesia sangat memerlukan pendekatan yang lebih integratif dan adaptif (Ineke Dellas Chrois Loliwu, 2025).

Ancaman *hybrid* yang melibatkan *shadow fleet* bukan hanya soal pelanggaran fisik di laut, tetapi juga dampaknya terhadap diplomasi dan pengaruh Indonesia di kawasan. Ketika negara-negara besar menggunakan *shadow fleet* sebagai alat diplomasi koersif untuk memperluas pengaruh mereka tanpa terlibat dalam konfrontasi terbuka, Indonesia harus dapat mengidentifikasi dan menanggapi ancaman ini secara lebih efektif (Hidayaturohman, 2020). Tantangan ini menuntut Indonesia untuk bertransformasi dari pendekatan keamanan maritim yang berbasis ancaman konvensional ke strategi yang lebih adaptif terhadap ancaman non-konvensional.

Selain itu, kegiatan ilegal yang dilakukan oleh *shadow fleet* dapat merusak ekosistem laut Indonesia yang kaya akan biodiversitas. Aktivitas transshipment ilegal, misalnya, tidak hanya mengganggu kestabilan pasar global, tetapi juga merusak sumber daya alam yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat pesisir Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk memasukkan strategi pelestarian lingkungan dalam kebijakan keamanan maritim nasional.

Kerentanan Indonesia terhadap ancaman *hybrid* ini juga disebabkan oleh ketimpangan antara kemampuan pengawasan yang terbatas dan kompleksitas geografis negara. Wilayah perairan Indonesia yang luas dan padat lalu lintas, tanpa dukungan teknologi pengawasan yang memadai, memberikan ruang bagi kapal-kapal *shadow fleet* untuk beroperasi secara tersembunyi (Fajri, 2020). Sistem pengawasan yang ada perlu diperkuat, baik melalui peningkatan teknologi maupun peningkatan koordinasi antar lembaga terkait.

Secara keseluruhan, ancaman *hybrid* yang dihadapi Indonesia memerlukan pendekatan yang lebih sistematis dan komprehensif. Tidak hanya dari segi teknologi, tetapi juga dalam hal kerjasama internasional, kebijakan hukum yang jelas, dan peningkatan kapasitas lembaga-lembaga maritim. *Shadow fleet* sebagai bagian dari ancaman *hybrid* harus dipahami dalam konteks yang lebih luas, termasuk peranannya dalam menggerus stabilitas kawasan dan menguji ketahanan diplomasi Indonesia di tingkat internasional.

### **Strategi Penguatan Keamanan Maritim Indonesia dalam Menangani Ancaman *Hybrid***

Keamanan maritim Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks, terutama dengan munculnya ancaman *hybrid* yang menggabungkan ancaman tradisional dan non-tradisional. Ancaman tersebut tidak hanya berupa perompakan dan kejahatan maritim lainnya, tetapi juga ancaman yang lebih halus, seperti *shadow fleet* atau armada gelap yang memanfaatkan kelemahan dalam pengawasan maritim Indonesia. Armada ini, yang sering mematikan sistem pelacakan kapal (AIS) dan mengubah identitas kapal, dapat melakukan aktivitas ilegal tanpa terdeteksi oleh otoritas yang ada. Ancaman semacam ini semakin

memperburuk kerentanannya, mengingat Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas namun belum dilengkapi dengan sistem pengawasan yang optimal (Sudiro, Pratondo, 2022).

Selain ancaman fisik, ancaman dunia maya juga menjadi masalah yang semakin mendesak dalam konteks keamanan maritim Indonesia. Peningkatan serangan siber terhadap sistem pengawasan maritim dapat melemahkan respons cepat terhadap ancaman hybrid. Oleh karena itu, penguatan kapasitas keamanan siber maritim menjadi prioritas untuk melindungi data pelayaran dan mencegah manipulasi yang bisa memperburuk situasi (Hermawan & Sutanto, 2022). Tidak hanya itu, Indonesia juga harus mengatasi kerentanan yang muncul akibat lemahnya koordinasi antar lembaga maritim. Kerjasama antar lembaga seperti TNI AL, Bakamla, dan Bea Cukai perlu diperkuat untuk memperbaiki pengawasan dan respons terhadap ancaman maritim.

Geopolitik kawasan juga turut mempengaruhi stabilitas maritim Indonesia. Sengketa Laut Cina Selatan dan ancaman dari negara besar seperti China dan Amerika Serikat semakin mempersulit pengelolaan keamanan maritim di kawasan Asia Tenggara. Indonesia, dengan posisi geografis yang strategis, harus mengoptimalkan diplomasi maritimnya untuk memperkuat perannya di kawasan ini, baik dalam mengelola sengketa laut maupun dalam menjalin kerjasama dengan negara-negara ASEAN (Samy & Kusumadewi, 2021). Diplomasi maritim menjadi alat yang sangat penting untuk mengurangi ketegangan dan memfasilitasi kerja sama yang lebih erat dalam menangani ancaman maritim lintas negara.

Dalam menghadapi ancaman *hybrid*, Indonesia juga mengembangkan kebijakan Poros Maritim Dunia (PMD) yang berfokus pada penguatan diplomasi maritim dan peningkatan kapasitas pertahanan laut. Melalui PMD, Indonesia berkomitmen untuk menjadikan dirinya sebagai pusat maritim dunia, yang tidak hanya bertujuan untuk memperkuat keamanan maritim domestik, tetapi juga untuk mendukung stabilitas kawasan. Keberhasilan Indonesia dalam menciptakan keamanan maritim yang solid di perairan nasional akan memberikan dampak positif terhadap keamanan regional, khususnya di ASEAN (Muh. Fadry Amry Guricci & Seniwati Seniwati, 2024).

Keamanan maritim Indonesia juga sangat dipengaruhi oleh tantangan internal, termasuk masalah penegakan hukum di laut. Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran menjadi kendala besar dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan pertahanan maritim. Oleh karena itu, Indonesia harus mengembangkan sistem pertahanan laut yang lebih modern, termasuk meningkatkan kapasitas alutsista dan memperkuat sistem koordinasi antar lembaga, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dengan memperbaiki sistem pengawasan dan

meningkatkan kerjasama antar lembaga, Indonesia akan lebih siap menghadapi ancaman yang datang dari luar dan dalam negeri.

Salah satu langkah penting yang perlu dilakukan adalah memperkuat kerjasama maritim dengan negara-negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia, seperti Malaysia, Filipina, dan Singapura. Kolaborasi ini sangat penting dalam menghadapi ancaman seperti perompakan dan penyelundupan, yang sering kali bersifat lintas negara. Melalui latihan gabungan, pertukaran informasi, dan operasi bersama, Indonesia dan negara-negara mitra dapat meningkatkan kesiapan dan respons terhadap ancaman maritim yang semakin kompleks.

Pentingnya kerjasama internasional dalam menjaga keamanan maritim juga diakui dalam berbagai forum regional seperti ASEAN Maritime Forum (AMF) dan Expanded ASEAN Maritime Forum (EAMF). Indonesia memainkan peran kunci dalam memperkuat forum-forum ini, yang menjadi wadah untuk koordinasi antara negara-negara ASEAN dalam menghadapi ancaman maritim lintas negara (Mustika et al., 2021). Dalam konteks ini, diplomasi maritim Indonesia tidak hanya berfokus pada penyelesaian sengketa atau konflik, tetapi juga pada pembangunan kapasitas dan kepercayaan antar negara untuk mengelola keamanan maritim secara bersama-sama.

Dengan demikian, Indonesia harus terus mengembangkan kapasitas pengawasan maritim yang lebih baik, baik melalui teknologi baru maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Hal ini akan meningkatkan kesiapan Indonesia dalam menghadapi ancaman hybrid yang semakin beragam, seperti terorisme maritim, perompakan, dan kejahatan transnasional lainnya. Dengan kerjasama yang lebih erat antar lembaga domestik dan negara-negara mitra internasional, Indonesia dapat memperkuat sistem keamanan maritimnya dan memastikan stabilitas di kawasan yang lebih luas.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Keamanan maritim Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks, terutama dengan munculnya ancaman hybrid yang menggabungkan ancaman tradisional dan non-tradisional. Ancaman ini, yang melibatkan fenomena *shadow fleet* atau armada gelap, semakin memperburuk kondisi pengawasan maritim yang ada. Armada gelap ini beroperasi secara tersembunyi dengan menggunakan kapal-kapal yang tidak terdaftar dan memanfaatkan celah pengawasan yang lemah untuk melakukan aktivitas ilegal seperti penyelundupan dan eksploitasi sumber daya alam. Keberadaan *shadow fleet* ini mengancam tidak hanya aspek

fisik, tetapi juga diplomasi Indonesia di kawasan maritim yang strategis, termasuk wilayah Laut Natuna dan Selat Sunda, yang menjadi titik rawan ancaman.

Selain ancaman fisik, ancaman dari kejahatan transnasional seperti perompakan, penyelundupan narkoba, dan penyelundupan manusia juga memperburuk kondisi maritim Indonesia. Kejahatan lintas negara ini semakin meluas, mengingat keterbatasan pengawasan dan koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam pengelolaan dan pengawasan perairan Indonesia. Oleh karena itu, penguatan kerjasama antarnegara di kawasan Asia Tenggara, khususnya melalui ASEAN, menjadi sangat penting untuk mengatasi tantangan ini. Kolaborasi yang lebih intensif dengan negara-negara tetangga dan organisasi internasional dapat meningkatkan efektivitas respons terhadap ancaman yang semakin beragam.

Dalam menghadapi ancaman *hybrid* yang semakin kompleks, Indonesia perlu mengembangkan kebijakan yang lebih terintegrasi dan adaptif, serta memperkuat kapasitas pengawasan maritimnya. Teknologi modern, seperti *Automatic Identification System* (AIS) dan sistem deteksi dini, perlu diterapkan untuk memperbaiki sistem pengawasan yang ada. Selain itu, koordinasi antar lembaga seperti Bakamla dan TNI AL harus diperkuat untuk meningkatkan respons terhadap ancaman yang lebih halus dan tersembunyi. Dengan langkah-langkah tersebut, Indonesia dapat memperkuat keamanan maritim dan menjaga kedaulatan wilayah lautnya.

### **Saran**

Pemerintah Indonesia perlu segera memperkuat kapasitas pengawasan maritim dengan mengadopsi teknologi canggih yang dapat meningkatkan deteksi dini terhadap ancaman seperti *shadow fleet*. Selain itu, integrasi data secara real-time antara lembaga-lembaga yang terlibat dalam pengawasan maritim perlu diperkuat untuk memastikan respons yang lebih cepat dan efektif terhadap ancaman yang muncul. Modernisasi sistem pengawasan maritim akan memberikan Indonesia kemampuan yang lebih baik dalam menghadapi ancaman hybrid yang sulit dideteksi dengan pendekatan konvensional.

Selain itu, Indonesia harus memperkuat kerjasama internasional dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan organisasi maritim regional seperti ASEAN untuk meningkatkan koordinasi dalam menangani ancaman maritim lintas negara. Diplomasi maritim yang lebih inovatif dan multilateral harus dijalankan untuk menciptakan kebijakan yang lebih terintegrasi dalam menjaga stabilitas kawasan. Kerjasama ini akan sangat mendukung dalam mengurangi ancaman yang berasal dari kejahatan transnasional dan memperkuat posisi Indonesia dalam geopolitik maritim global.

**DAFTAR REFERENSI**

- Alam, M. S., Nugroho, M. A., & Adha, F. (2024). Analisis keamanan siber dalam konteks pertahanan maritim Indonesia. *JIIP – Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(8), 8289–8292. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i8.5675>
- Anugra Agustian Ekaputra, A., Pramesti, A. A., Trianjeli, A., Sitompul, R. S., & Susanti, P. (2025). Paradoks kedaulatan maritim Indonesia di Laut Natuna: Kritik terhadap efektivitas implementasi UU No. 32 Tahun 2014 tentang kelautan dalam menghadapi ekspansionisme regional. *CAUSA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 15(9), 167–186.
- Anwar, S. (2016). Membangun keamanan maritim Indonesia. *Jurnal Pertahanan*, 6, 1–22. <https://jurnal.idu.ac.id/index.php/JPBH/article/download/315/190>
- Bueger, C., & Edmunds, T. (2017). Beyond seablindness: A new agenda for maritime security studies. *International Affairs*, 93(6), 1293–1311. <https://doi.org/10.1093/ia/iix174>
- Damayanty, H. H. (2023). Peningkatan keamanan maritim melalui teknologi deteksi dan pencegahan kapal berbahaya. *TRANSBORDERS: International Relations Journal*, 6(2), 37–49. <https://doi.org/10.23969/transborders.v6i2.10352>
- Fajri, B. M. (2020). Indonesia maritime defense strategy toward hybrid warfare in South China Sea. *Jurnal Penelitian Politik (LIPI)*, 17(1), 59–78. <https://doi.org/10.14203/jpp.v17i1.846>
- Fischer, E. M. (2024). *Sanctions and the shadow fleet: Assessing the effectiveness of measures against deceptive shipping practices in the Arctic LNG trade*.
- Guricci, M. F. A., & Seniwati. (2024). Strategi keamanan maritim di Asia Tenggara: Kerjasama diplomasi maritim di ASEAN. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 1(6), 130–139. <https://doi.org/10.62383/konsensus.v1i6.474>
- Hermawan, T., & Sutanto, R. (2022). Strategi pertahanan laut Indonesia dalam analisa ancaman dan kekuatan laut. *Jurnal Education and Development*, 10(2), 363–371.
- Hidayaturohman, A. (2020). Analisis prioritas ancaman di Laut Natuna dengan menggunakan analytic network process (ANP). *Indonesian Maritime Journal*, 8, 179–188. <https://pusjianmar-seskoal.tnial.mil.id/index.php/IMJ/article/view/41>
- Latunrung, Q. A. R., & Nugraha, I. F. (2025). Peran strategis Indonesia dalam meningkatkan keamanan maritim di kawasan Asia Tenggara. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 2(3), 44–59. <https://doi.org/10.62383/konsensus.v2i3.918>
- Loliwu, I. D. C., & Nugraha, I. F. (2025). Shadow fleet dan ancaman hybrid: Kerentanan keamanan maritim Indonesia. *Triwikarma: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, 8(10).
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Raja Grafindo Persada.
- Mustika, P. L. K., Williams, R., Kadarisman, H. P., Purba, A. O., Maharta, I. P. R. F., Rahmadani, D., Faiqoh, E., & Dewantama, I. M. I. (2021). A rapid assessment of the marine megafauna biodiversity around South Bali, Indonesia. *Frontiers in Marine Science*, 8, 1–15. <https://doi.org/10.3389/fmars.2021.606998>
- Prasetyo, H., Suharto, Priyanto, & Santoso, T. I. (2025). Hybrid warfare and total defense strategy: Indonesia's comprehensive security framework in the Indo-Pacific era.

*International Journal of Humanities Education and Social Science*, 5(1), 311–321.  
<https://doi.org/10.55227/ijhess.v5i1.1786>

- Rodriguez-Diaz, E., Alcaide, J. I., & Endrina, N. (2025). Shadow fleets: A growing challenge in global maritime commerce. *Applied Sciences (Switzerland)*, 15(12).  
<https://doi.org/10.3390/app15126424>
- Sajidin, M., Saputra, I., & Nofiasari, W. (2023). Strategi keamanan maritim Indonesia dalam menghadapi ancaman kejahatan transnasional di Asia Tenggara. *Jurnal Lemhannas RI*, 11(3), 170–177. <https://doi.org/10.55960/jlri.v11i3.476>
- Samy, M., & Kusumadewi, J. A. (2021). Diplomasi pertahanan maritim Indonesia dalam menghadapi ancaman keamanan non-tradisional: Upaya mewujudkan visi poros maritim dunia. *Jurnal Hubungan Internasional*, 14(1), 45.  
<https://doi.org/10.20473/jhi.v14i1.25547>
- Siregar, E. R. E., & Prabandari, A. P. (2022). Indonesian sovereignty rights in the case of entry of Malaysian DA62 aircraft G-DVOR into Indonesian territory. *Indonesian Journal of Aerospace*, 20(2), 76–83. <https://doi.org/10.30536/j.jtd.2022.v20.a3936>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2013). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Sudiro, P., & Jupriyanto. (2022). Konsep operasi patroli Bakamla RI dalam menghadapi ancaman hibrida di wilayah zona maritim Natuna. *Jurnal Maritim Indonesia*, 10(3), 235–248.
- Sumadinata, W. S. (2022). Membangun kebijakan pertahanan maritim Indonesia: Telaah kritis fungsi keamanan laut Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. *IJD-Demos*, 4(2).  
<https://doi.org/10.37950/ijd.v4i2.259>
- Sunoto, S. P., & Fahriani, A. A. (2023). Dampak sekuritisasi konflik Laut Cina Selatan terhadap keamanan maritim Indonesia. *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional*, 6(2). <https://doi.org/10.7454/jkskn.v6i2.10084>
- Yani, Y. M., & Montratama, I. (2018). Indonesia sebagai poros maritim dunia: Suatu tinjauan geopolitik. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 5(2), 25–52.  
<https://doi.org/10.33172/jpbh.v5i2.356>
- Zzahra, N., & Hamandia, M. R. (2025). Kajian strategis keamanan maritim menanggulangi ancaman terhadap laut dan perdagangan internasional. *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, 11(3), 1–10.